

# **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT**

**Aditya Kurniawan \***

*Universitas Tanjungpura, Indonesia*

## **ABSTRACT**

This study aims to examine and analyze the effect of economic growth, investment, unemployment rate, and education level on poverty rates in the border districts of West Kalimantan. This study uses secondary data in the form of panel data, namely cross sections consisting of 5 regencies in the border area of West Kalimantan and time series for 8 years (2013-2020) through the panel data regression method with the help of Eviews 9 software. The results of this study explain that the variables of economic growth and level of education affect poverty levels. while the investment variable and the unemployment rate have no effect on the poverty rate in the border districts of West Kalimantan.

**Keywords :** *Economic Growth, Investment, Unemployment Rate, Education Level, Poverty Rate.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten wilayah perbatasan Kalimantan Barat. penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yaitu cross section yang terdiri dari 5 kabupaten wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan time series selama 8 tahun (2013-2020) melalui metode regresi data panel dengan bantuan software Eviews 9. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. sedangkan variabel investasi dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

**Kata Kunci :** *Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kemiskinan.*

## **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi awalnya hanya mengukur tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), baik dalam konteks keseluruhan maupun per kapita (ekonomi tradisional), berbeda dengan ekonomi baru. Pembangunan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan PDB tetapi juga meminimalisir kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta menciptakan lapangan kerja dalam menggerakkan perekonomian yang terus berkembang disuatu negara/daerah (Todaro, 2000). Sejalan dengan tujuan dari pembangunan yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk (Fahmi et al, 2018).

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai perbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu malaysia. daerah tersebut adalah kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Wilayah perbatasan adalah daerah

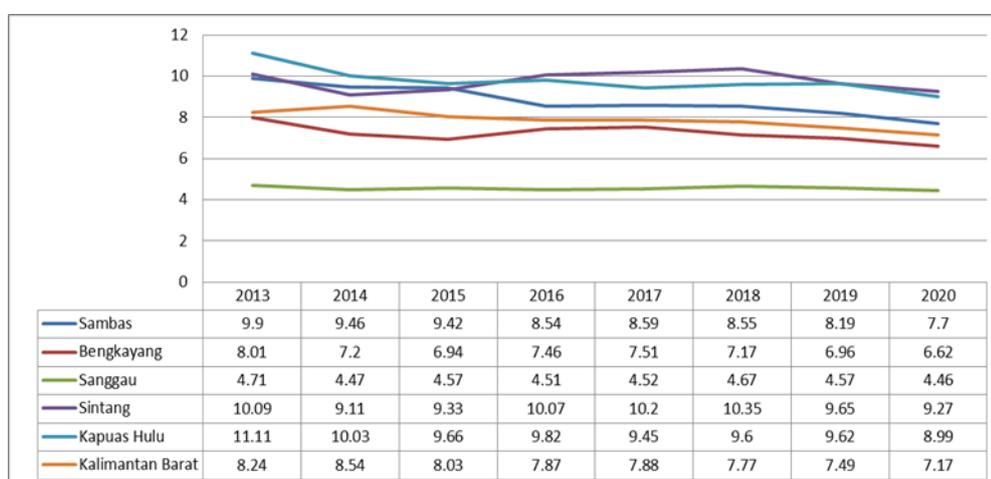
---

\*Kurniawanaditya56@gmail.com

yang cocok dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dimana wilayah perbatasan menjadi pintu keluar masuknya akses antar 2 daerah sehingga sangat mudah untuk perekonomian berkembang tetapi, wilayah perbatasan juga memiliki permasalahan perekonomian seperti kesenjangan pembangunan sehingga dapat memunculkan kemiskinan (Giyarsih,2014). Wilayah perbatasan juga sering kali dianggap sebagai wilayah yang tertinggal, wilayah pedesaan, wilayah pinggiran, dan wilayah miskin yang dimana wilayah perbatasan sangat minim dengan fasilitas yang memadai seperti akses jalan raya, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya (Hendrayady,2018). sehingga tidak dipungkiri permasalahan kesejahteraan masyarakat pasti ada seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan masyarakat perbatasan dalam pembangunan.

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan wilayah perbatasan, maka diperlukan penataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. sehingga dalam mengentaskan permasalahan tersebut diperlukannya strategi kebijakan yang matang dalam pembangunan sehingga dapat terwujud dan sesuai dengan harapan masyarakat perbatasan yaitu masalah kesejahteraan sehingga tidak menjadi wilayah tertinggal yang selalu menghantui wilayah tersebut, karena pembangunan wilayah perbatasan merupakan salah satu agenda yang menjadi agenda pembangunan daerah yang paling mendesak. Artinya pembangunan wilayah perbatasan adalah suatu agenda pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah (Sudiar, 2017).

Topik kemiskinan menjadi bahan yang sangat cocok untuk masa sekarang ini, meskipun kemiskinan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu (Azizah et al,2018). Munculnya penelitian ini dilakukan dimana tingkat kemiskinan di wilayah perbatasan negara di provinsi Kalimantan Barat yang dilihat mengalami penurunan di setiap tahunnya dan memberikan angin segar baik bagi pemerintah pusat dan daerah. Menurut kuncoro (1997), Kemiskinan adalah dimana ketidakcukupan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup baik dari segi konsumsi dan pendapatan. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional yang seluruh Negara di dunia termasuk negara sedang berkembang (NSB) sangat rentan terhadap kemiskinan.



**Gambar 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan Menurut Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat**

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2013 – 2020)

Tingkat kemiskinan yang tinggi di kabupaten wilayah perbatasan provinsi Kalimantan Barat dapat berpengaruh negatif terhadap perekonomian daerah tersebut baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Perbedaan yang sangat terasa dan bisa dilihat adalah dari kesehatan, pendidikan dan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan lain-lain (Mufizar et al,2012). Dilihat dari Gambar 1.1 persentase tingkat kemiskinan menurut wilayah perbatasan di Kalimantan Barat Selama 8 tahun dimana pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif cenderung penurunan dimana ke 5 kabupaten wilayah perbatasan pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan yang tidak begitu besar sehingga dari tahun 2013-2020 rakyat miskin di provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan sebanyak 3.251 juta jiwa atau sekitar 1,07% .

Dari pernyataan diatas dilihat bahwa tingkat kemiskinan di daerah perbatasan di setiap tahunnya mengalami penurunan (3 dari 5 kabupaten wilayah perbatasan di Kalimantan Barat) hal ini tidak luput oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan di wilayah perbatasan. Kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di wilayah menjadi tinggi karena disebabkan disparitas antar wilayah yang berakibat tidak meratanya penghasilan pendapatan menjadi salah satu akar dari permasalahan kemiskinan di wilayah perbatasan Indonesia (sianturi, 2011).

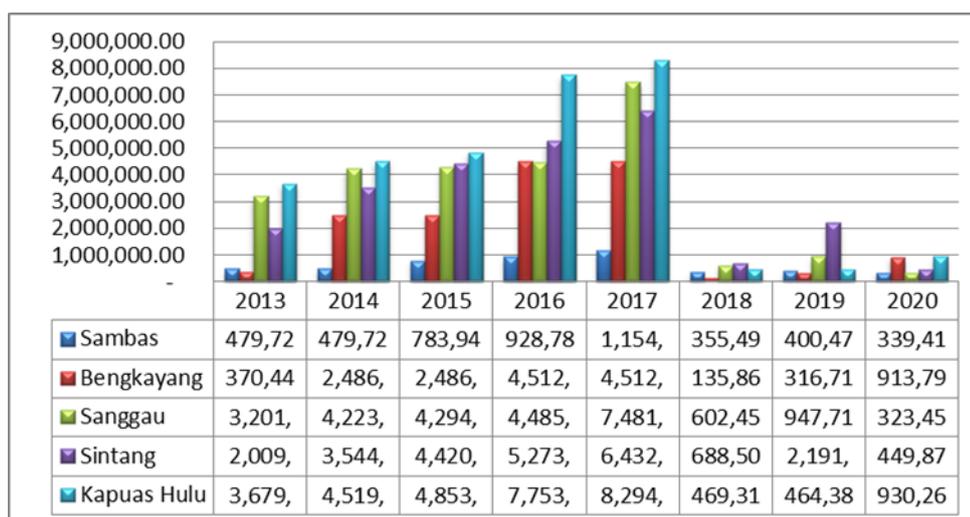


**Gambar 1.2 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat**

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2013 – 2020)

Dilihat pada Gambar 1.2 persentase tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan di Kalimantan Barat relatif fluktuatif setiap tahun nya bahkan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup besar. pada tahun tersebut setiap wilayah di Indonesia termasuk 5 kabupaten wilayah perbatasan provinsi Kalimantan Barat mengalami permasalahan yang dihadapi setiap negara yaitu mewabahnya suatu penyakit Corona Virus (COVID-19) sehingga membuat perekonomian di daerah cukup terganggu dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan berada di angka minus meskipun wilayah sanggau pertumbuhan ekonominya masih di atas angka minus yaitu sebesar 0,71% sedangkan 4 wilayah lainnya berada dibawah garis angka 0 yaitu Bengkayang -1,99% , Sambas -2,04 , Sintang 2,19% , dan Kapuas Hulu menjadi wilayah tertinggi penurunan yaitu sebesar -2,43 cukup besar dari angka pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu sebesar -1,82% pada tahun 2020.

Selain pertumbuhan ekonomi terdapat faktor lain seperti investasi yang dimana menjadi sumber pembangunan ekonomi, modernisasi, pertumbuhan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dalam pengurangan kemiskinan di wilayah perbatasan. Investasi sangat diperlukan dalam pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Investasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan untuk menentukan strategi dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (Paramita & Purbadharmaja, 2015). Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Ocaya et al,2012). Menurut Sadono (2011;121) investasi merupakan penanaman modal dan pengeluaran perusahaan dalam meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.



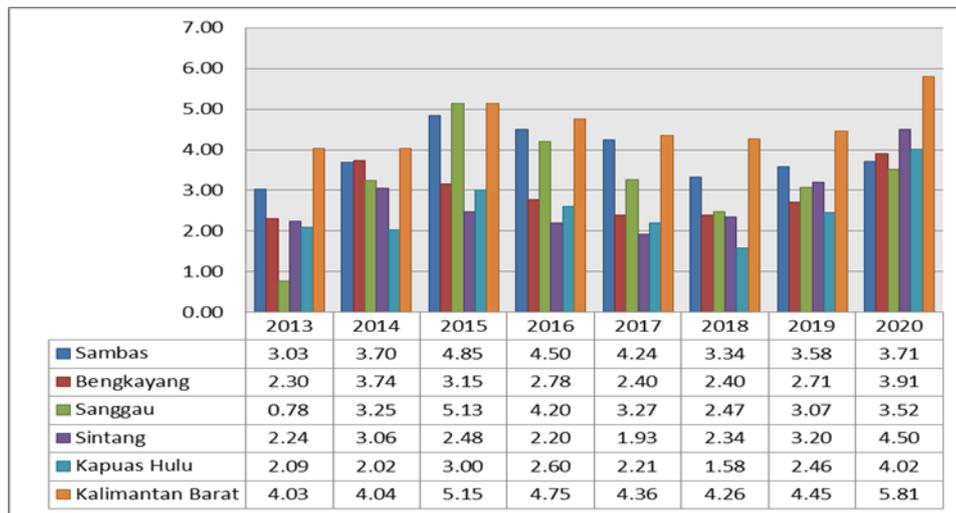
**Gambar 1.3 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Investasi) Menurut Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat**

*Sumber : BPS Kalimantan Barat (2013-2020)*

Berdasarkan Gambar 1.3 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Investasi) menurut wilayah perbatasan 4 dari 5 kabupaten Kalimantan Barat menunjukkan fluktuatif cenderung mengalami peningkatan penanaman modal dalam negeri dari tahun 2013-2020. Meskipun pada tahun 2018 menjadi tahun dimana seluruh wilayah perbatasan mengalami penurunan investasi dalam negeri yang cukup besar dan dapat berpengaruh buruk pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan kemiskinan daerah. Selama 8 tahun menurut BPS Kalimantan Barat investasi dalam negeri tertinggi di wilayah perbatasan negara terjadi pada tahun 2017 di kabupaten Kapuas hulu sebesar 8.294.431,97 juta rupiah dan daerah yang menerima investasi dalam negeri terkecil adalah kabupaten sanggau yaitu pada tahun 2018 yang dimana besaran investasi terjadi berkisar 135.866,00 juta rupiah.

Selain investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam melihat kinerja pembangunan adalah ketersediaan lapangan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja di wilayah perbatasan. Karena peningkatan produktivitas barang/ jasa juga dapat berpengaruh pada permintaan pasar tenaga kerja dan pengangguran berkurang sehingga berdampak pada menurunnya kemiskinan di wilayah tersebut (Yacoub, 2012).

Menurut Tambunan dalam purnama (2017), menyatakan pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan peningkatan kesempatan kerja akan berakibat pada ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*Ceteris Paribus*) dan dapat menciptakan suatu keadaan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya kemiskinan di wilayah tersebut. Artinya dalam pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pengurangan pengangguran sangatlah dibutuhkan sehingga tidak terjadinya peningkatan kemiskinan di kabupaten wilayah perbatasan Kalimantan Barat.



**Gambar 1.4** Persentase Tingkat Pengangguran Menurut Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat

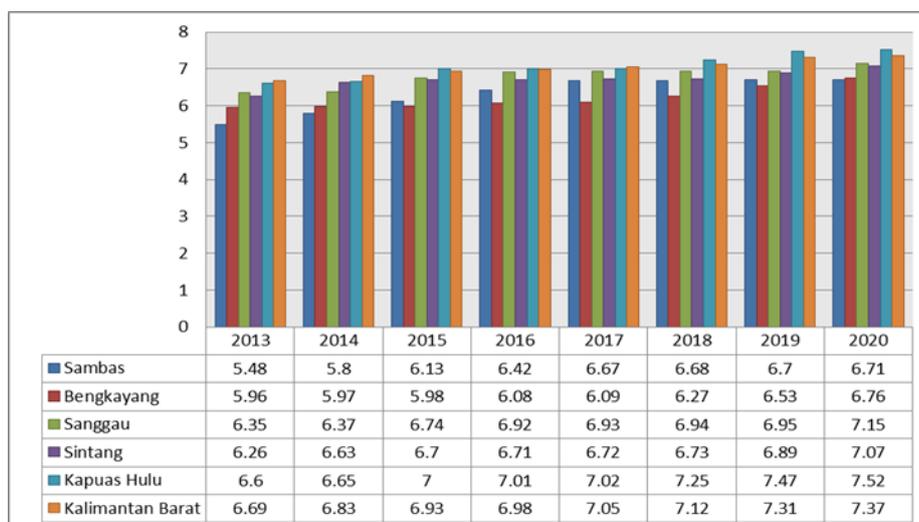
*Sumber : BPS Kalimantan Barat (2013 – 2020)*

Berdasarkan Gambar 1.4 persentase tingkat pengangguran wilayah perbatasan di Kalimantan Barat menggambarkan keadaan yang fluktuatif cenderung meningkat dilihat dari tingkat pengangguran provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebesar 4,03% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 5,81% meningkat sekitar 1,78% dan kabupaten sanggau menjadi tingkat pengangguran tertinggi dan terendah dari ke-5 kabupaten wilayah perbatasan selama 8 tahun yaitu pada tahun 2015 dan 2013 yaitu sebesar 5,13% dan 0,78%. Meskipun tingkat pengangguran yang cenderung fluktuatif diharapkan menjadi faktor terjadinya penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Selain dilihat dari pertumbuhan ekonomi, investasi (penanaman modal dalam negeri), dan tingkat pengangguran dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari pembentukan sumber daya manusia yang memadai melalui pendidikan. Peningkatan pendidikan penduduk dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan (Giovanni,2018).

Berdasarkan Gambar 1.5 tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) wilayah perbatasan di Kalimantan Barat setiap tahun selalu mengalami peningkatan di bidang pendidikan terlihat dari angka rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah masyarakat di wilayah perbatasan setara dengan tamatan sekolah menengah pertama (SMP) kelas 1 pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah masyarakat perbatasan setara dengan tamatan pendidikan sekolah dasar (SD). Tingkat pendidikan di wilayah perbatasan tertinggi terjadi pada kabupaten Kapuas hulu di tahun 2020 rata-rata lama sekolah masyarakat yang merasakan pendidikan yaitu

selama 7,52 tahun dan terendah terjadi pada kabupaten sambas di tahun 2012 dimana rata-rata lama sekolah masyarakat yang merasakan pendidikan hanya setara kelas 5 SD atau sekitar 5,48 tahun.



**Gambar 1.5 Tingkat Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) Menurut Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat**

*Sumber : BPS Kalimantan Barat (2013 – 2020)*

Menurut Faritz dan Soejoto (2020), peningkatan di bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Penurunan kemiskinan terjadi disebabkan oleh terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya, apabila terjadinya pertumbuhan PDB secara terus menerus maka akan menurunkan angka kemiskinan. Sedangkan teori ekonomi neo-klasik Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan tolak ukur pertumbuhan ekonomi di daerah. Sesuai dengan teori human capital modal di bidang pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki produktivitas tinggi, yang artinya semakin tinggi pendidikan maka akan semakin berkualitas SDM sehingga dengan pendidikan yang tinggi dapat membuat seseorang tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Dari penjelasan di atas terhadap wilayah perbatasan yang identik dengan daerah tertinggal maupun daerah miskin yang dimana minimnya fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga perekonomian tidak berjalan dengan baik bukan hanya itu kualitas pendidikan di wilayah perbatasan yang masih rendah menjadi faktor SDM di perbatasan juga rendah sehingga dapat memunculkan kemiskinan yang tinggi. tetapi dari data BPS Kalimantan Barat yang didapat dilihat bahwa adanya penurunan tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten wilayah perbatasan Kalimantan Barat dalam rentang 2013-2020. Sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat” dimana adanya perbedaan dari keadaan wilayah perbatasan dan data yang didapat oleh peneliti.

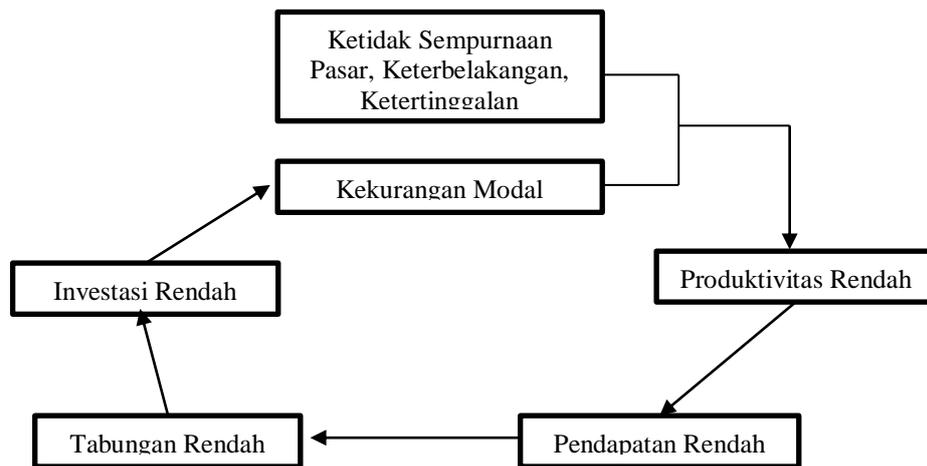
Dari rumusan masalah tersebut maka, tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah : 1)Menganalisis dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di

kabupaten wilayah perbatasan Kalimantan Barat. 2) Menganalisis dan menguji pengaruh investasi terhadap kemiskinan di kabupaten wilayah perbatasan Kalimantan Barat. 3) Menganalisis dan menguji pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten wilayah perbatasan Kalimantan Barat. 4) Menganalisis dan menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di kabupaten wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. Tinjauan Teori

#### 2.1.1 Teori Lingkaran Setan



Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Menurut Ragnar Nurkse

Sumber : Kuncoro (1997)

Menurut Nurkse dalam Kuncoro (1997), mengemukakan ada 3 penyebab kemiskinan yang bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yaitu terdapatnya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Dari rendahnya produktivitas membuat kecilnya pendapatan yang diterima. Kecilnya pendapatan yang mereka terima akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi (manusia dan modal). Rendahnya investasi pada akhirnya membuat ketidaksempurnaan pasar dan menjadi ketertinggalan sesuai pada Gambar 2.1.

#### 2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Menurut Todaro (2015), kemiskinan adalah dimana ketidakmampuan atau hampir tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang ada sejak umat manusia hidup hingga sekarang ini belum ada kebijakan yang pasti dalam mengentaskan kemiskinan hingga terus menerus dikembangkan sampai sekarang (Kurniawan, 2017).

Menurut Yacoub (2012), kemiskinan merupakan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar dan masalah global yang ada di setiap negara. Oleh karena itu, miskin merupakan kondisi seseorang atau kelompok yang tidak memiliki sarana dan prasarana dasar dalam lingkungan hidup yang memadai, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari (Annur, 2018).